

**Konsep Politik Melayu di Pulau Bangka
(Studi Analisis Undang-Undang Sindang Mardika)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Politik



Diajukan Oleh :

ABDUL ROHMAN

5021611001

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

2020

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KONSEP POLITIK MELAYU DI PULAU BANGKA
(Studi Analisis Undang-Undang Sindang Mardika)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

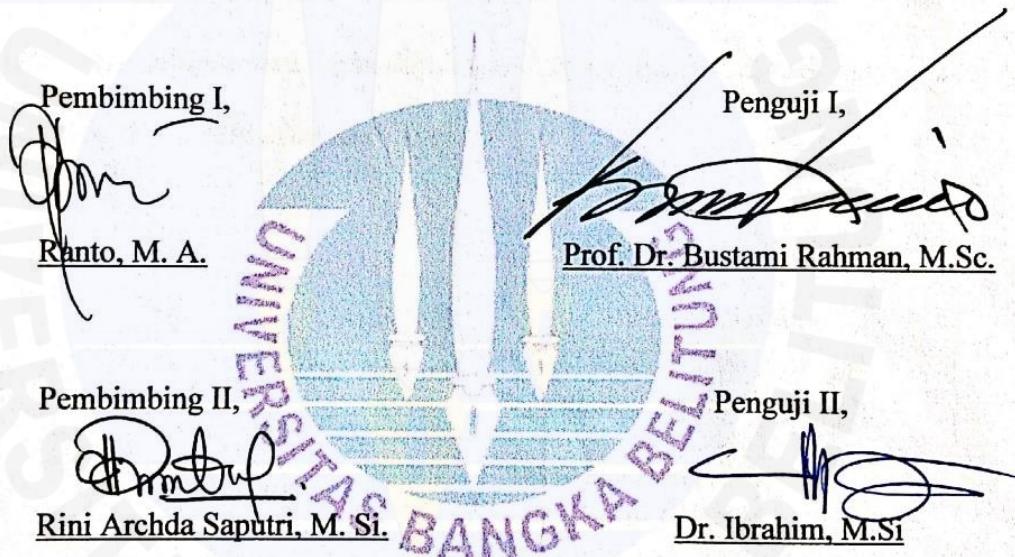
ABDUL ROHMAN

(502 16 11 001)

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal 01 September 2020

Susunan Dewan Pengaji



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana S-1

Tanggal 01 September 2020



Sujadmi, M.A.

Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik

PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rohman
Nomor Induk Mahasiswa : 5021611001
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “KONSEP POLITIK MELAYU DI PULAU BANGKA (Studi Analisis Undang-Undang Sindang Mardika)” ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia dikenakan sanksi

Balunjuk, 15 September 2020

Yang menyatakan,



Abdul Rohman

MOTTO

I don't always get what I want, but Allah knows what I need

By Salahudin Al Ayyubi (1453)

Allah tidak membebani seorang melaikan sesuai dengan kesanggupannya.
(QS. Al Baqarah: 286)

Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan
(QS. AL Hadid:4)

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.
(QS, Al-Imran: 73)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan dengan segenap rasa kepada:

- ❖ Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Ayah dan Ibu, Darman Marsi dan Mulyani terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini
- ❖ Kakak kandung Imam Maruf, terima kasih telah menjadi pembimbing sejak awal serta dukungan.
- ❖ Adikku Azahrah terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
- ❖ Sahabat seperjuangan, Mirendy, Amru, Johan, Sabarmalumaberutu dan Yandi yang telah menjadi sahabat serta selalu mendukung dan berjuang sejak awal perkuliahan
- ❖ Seluruh teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2016 yang turut mengisi hari-hari perkuliahan, serta memberikan semangat setiap kuliah, sehingga terasa sangat menyenangkan dengan canda dan tawa.
- ❖ Sahabat mengaji, Abang Novri, Abang Firhand, Asdiki dan Aji yang selalu mengisi kajian dengan penuh ilmu yang bermanfaat.
- ❖ Sahabat kos, Abang Fasta Adris, Abet, Hodri yang selalu memotivasi hidup ini seperti secangkir kopi di mana pahit dan manis bertemu dalam kehangatan.
- ❖ Terakhir, skripsi ini dipersembahkan untuk diri sendiri, mengingat perjuangan sejak awal hingga menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saat ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpah rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Politik Melayu di Bangka (Studi Analisis Undang-Undang Sindang Mardika). Penulis merasa bersyukur telah menyelesaikan tanggung jawab dan status sebagai mahasiswa di kampus peradaban, kampus yang kita cintai bersama, Universitas Bangka Belitung. *Shalawat* serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Kita sebagai umatnya semoga mendapat syafaat kelak dari beliau di akhirat nanti, amin.

Proses penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari campur tangan dan dukungan berbagai pihak dengan berbagai bantuan, bimbingan, serta doa dan semangat dari semua pihak yang turut mewarnai di dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk menuturkan ucapan terima kasih terkhusus kepada:

1. Ranto, M.A, selaku Kepala Laboratorium Program Studi Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I yang memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini
2. Rini Archda Saputri, M.Si, selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi II yang memberikan arahan pembelajaran, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi, semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan.

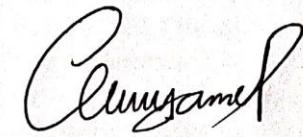
3. Sujadmi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pembelajaran di masa perkuliahan serta memberikan semangat agar cepat menyelesaikan tugas akhir dengan bekal ilmu yang bermanfaat.
4. Dr. Ibrahim M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung sekaligus Pengudi Skripsi II yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat atas penelitian penulis.
5. Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc, selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi sekaligus Pengudi Skripsi I yang telah memberikan kritik dan solusi agar bisa lebih menarik dalam studi penelitian ini.
6. Segenap Staf BAAK, BAUK, Staf Jurusan Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas dukungan terhadap penulis selama masa perkuliahan.
7. Kedua Orang tua, yaitu Bapak Darman Marsi dan Ibu Mulyani yang tidak ada hentinya memberikan dukungan dan do'a terhadap penulis.
8. Drs. Akhmad Elvian, DPMP, selaku Sekretaris LAM Babel Periode 2017-2022 yang telah memberikan pembelajaran yang cukup banyak mengenai penelitian penulis serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi.
9. Bambang Haryo Suseno, SH.,M.Ed.Dev, selaku Kabid Disbudpar Babar yang telah membimbing penelitian dan serta memberikan saran literasi penelitian penulis.

Bagi seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak atas segala doa dan dukungan serta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan, bantuan dan amal baik dari pihak tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan penulisan

senantiasa berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk berbagai pihak,

Amiin.

Balunijk, 21 September 2020



Abdul Rohman

ABSTRAK

ABDUL ROHMAN. KONSEP POLITIK MELAYU DI PULAU BANGKA (Studi Analisis Undang-Undang Sindang Mardika). Dibimbing oleh Ranto dan Rini

Etnis Melayu di Bangka mempunyai konsep politik berdasarkan adatnya, dilihat proses terbentuknya konsep politik diketahui dalam ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, serta adat-istiadat yang merupakan faktor primordial sebagai pembentuk identitas etnis Melayu. Kebudayaan orang Melayu dalam sejarahnya mempunyai kesamaan persepsi tentang asal-usul, sehingga muncul aturan-aturan, nilai, dan tujuan yang dapat menjadikan identitas tersebut tersatukan dalam kelompok sebagai etnis Melayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat sejarah konsep politik Melayu berdasarkan hukum adat masyarakat etnis Melayu yang ada di Pulau Bangka. Dilihat dari berlakunya hukum adat di Pulau Bangka dipersatukan oleh kesatuan wilayah masyarakat hukum adat terrestrial, yaitu hukum adat berdasarkan pertalian tempat tinggal yang kental sekali dengan kebudayaan etnis Melayu dalam kehidupan masyarakatnya. Konsep Politik etnis Melayu dalam bahasan ini akan lebih ditonjolkan mengenai kekuatan reputasi politik dalam mengatur wilayah Bangka serta menjaga kestabilan sosial, ekonomi dan politik dari sejarah dan transformasinya ke kondisi terkini.

Penelitian ini menggunakan teori rekonstruksi hukum menurut Lawrence M. Friedman berdasarkan pembangunan masyarakat Melayu menuju kedaulatan kearifan lokal, yaitu: Pertama, substansi hukum yang mencakup keputusan atau aturan dalam menata ulang, selanjutnya keputusan yang akan dibentuk berdasarkan pengalaman manusia dengan merealisasikan haknya serta mencakup norma, aturan, dan perilaku nyata manusia. Kedua, struktur hukum meliputi pengambilan kebijakan dan penerapan hukum, adapun pemerintahan berperan penting dalam kualitas hukum berproses dan penegak hukum memiliki kredibilitas, kompeten dan independen. Ketiga, budaya hukum meliputi reputasi sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan dalam sistem hukum berada di kerangka budaya milik masyarakat, serta masyarakat menentukan bagaimana hukum itu berlaku dan berkeadilan. Hal tersebut penting untuk meninjau kembali sebagai literasi dan direalisasikan dalam tatanan menguatkan identitas etnis Melayu terkini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dokumentasi historis. Adapun data terhadap objek yang diteliti secara langsung dengan pengumpulan data historis, data tersebut dapat diuji kebenarannya dan keabsahannya melalui penelitian perpustakaan maupun wawancara sebagai pendukung data yang valid.

Hasil penelitian ini akan dibahas mulai dari pengaruh bahasa Melayu Kuno, Pengaruh Hindu-Budha dan Islamisasi di Pulau Bangka, dimana cikal bakal sejarah hukum adat yang membentuk eksistensi konsep politik Melayu. Selanjutnya masa Kesultanan Palembang sebagai periode lahirnya struktur kekuasaan yang membentuk Undang-Undang Sindang Mardika sehingga muncul kebijakan ekonomi politik, ekologi politik, sosial budaya dan politik Islam dalam eksistensinya. Di dalam konsep politik Melayu ini terlihat dalam perkembangan Undang-Undang Sindang Mardika dari periode awal abad ke-18, sehingga dapat dibedakan perubahan-perubahan yang terjadi dari masa pra-kolonial hingga masa kini (kemerdekaan). Dalam kondisi terkini di perlukan rekonstruksi penataan kembali hukum adat yang berperan penting membangun kearifan lokal sebagai sarana pembaharuan dan keteraturan pada sistem masyarakat etnis Melayu di Pulau Bangka. Maka diperlukan Substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum berdasarkan kearifan lokal etnis Melayu dalam menguatkan identitas Melayu terkini.

Kata kunci: Konsep, Politik Melayu, Rekonstruksi Politik hukum

ABSTRACT

Abdul Rohman. THE POLITICAL CONCEPT OF MELAYU IN BANGKA ISLAND (Study on Analysis of the Sindang Mardika Law). Guided by Ranto and Rini,

Ethnics Melayu in Bangka have a political concept based on their customs, in view of the process of forming political concepts, it is known in terms of kinship and ethnic equality, as well as customs which are primordial factors forming the identity of ethnic Malay. Historically, the culture of the Malay people has the same perception of origins, so that rules, values, and goals emerge that can make these identities united in groups as ethnic Malays. This study aims to raise the history of the Malay political concept based on the customary law of the Malay ethnic community in Bangka Island. Judging from the enactment of customary law on the island of Bangka, it is united by the territorial unity of the terrestrial customary community, namely customary law based on a very strong relationship between Malay ethnic culture in the life of its people. The concept of ethnic Malay politics in this discussion will be emphasized more on the strength of political reputation in regulating the Bangka region and maintaining social, economic and political stability from history and its transformation to current conditions.

This study uses the theory of legal reconstruction according to Lawrence M. Friedman based on the development of the Malay community towards local wisdom sovereignty, namely: First, legal substance which includes decisions or rules in rearranging, then decisions will be formed based on human experience by realizing their rights and covering norms, rules, and real human behavior. Second, the legal structure includes policy making and law enforcement, while the government plays an important role in the quality of the legal process and law enforcers are credible, competent and independent. Third, legal culture includes a social reputation that determines how law is used in the legal system within the framework of the culture belonging to the community, and society determines how the law applies and is fair. This is important to revisit as literacy and be realized in an order to strengthen the current ethnic Malay identity. The method used in this research is qualitative historical documentation. As for the data on the object studied directly by collecting historical data, the data can be tested for truth and validity through library research and interviews as supporting valid data.

The results of this research will be discussed starting from the influence of the ancient Malay language, the influence of Hinduism and Islamization on the island of Bangka, where the origin of the history of customary law that shaped the existence of the concept of Malay politics. Furthermore, the Palembang Sultanate was a period of the birth of the power structure that formed the Sindang Mardika Law so that political economy, political ecology, socio-cultural and political Islam policies emerged in its existence. In the Malay political concept, it is seen in the development of the Sindang Mardika Law from the early 18th century, so that changes that occurred from the pre-colonial period to the present (independence) can be distinguished. In current conditions, it is necessary to reconstruct the rearrangement of customary law which plays an important role in building local wisdom as a means of renewal and order in the system of the ethnic Malay community on Bangka Island. So a legal substance, legal structure and legal culture are needed based on local ethnic Malay wisdom in strengthening the current Malay identity.

Keywords: Concept, Malay Politics, Legal Political Reconstruction



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Teoretis.....	7
2. Praktis.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoretis.....	11
B. Operasionalisasi Konsep.....	13
C. Alur Berpikir.....	17
D. Penelitian Terdahulu.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Desain Penelitian.....	22
B. Jenis dan Sumber Data.....	24
C. Subyek dan Teknik Penentuan Informan.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	29
A. Sejarah Pulau Bangka.....	29
B. Wilayah Administratif.....	31
C. Konsentrasi Pembangunan.....	32
D. Indeks Pembangunan.....	32
E. Kondisi Geografis.....	33
F. Kondisi Sosial Budaya.....	34
G. Asal Muasal Nama Bangka.....	36
H. Sejarah Pemberlakuan Undang-Undang Sindang Mardika.....	38
I. Peraturan Undang-Undang Sindang Mardika.....	40

BAB V PEMBAHASAN.....	45
A. Sejarah Hukum Adat Melayu di Bangka.....	45
1. Pengaruh Bahasa Melayu Kuno di Pulau Bangka.....	45
2. Pengaruh Adat Melayu Hindu-Budha di Bangka	49
3. Tata Pemerintahan di Bangka Pada Masa Kekuasaan Palembang.....	55
B. Konsep Politik Melayu terkait Hukum Adat Sindang Mardika.....	60
1. Struktur Kekuasaan Menteri Rangga.....	63
2. Pemimpin Patih dan Batin (Sistem Pemerintah).....	66
3. Ekonomi Politik di Bangka Mengatur Timah Tiban dan Kuli.....	69
4. Sosial Budaya.....	73
5. Ekologi Politik.....	75
6. Sistem Politik Islam.....	78
C. Transformasi Konsep Politik Melayu di Pulau Bangka.....	81
1. Pada Masa Kekuasaan Belanda di Pulau Bangka.....	81
2. Kampung Melayu di Bangka Sebagai Kesatuan Hukum Adat.....	84
3. Hambatan Eksistensi Gerakan Masyarakat Adat di Bangka.....	87
D. Analisis Rekonstruksi Politik Hukum Adat di Bangka.....	91
1. Substansi Hukum (Legal Substance).....	92
2. Struktur Hukum (Legal Structure).....	93
3. Budaya Hukum (Legal Culture).....	94

BAB VI PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Pulau Bangka 2010-2018.....	33
Tabel 1.2 konsep politik Melayu di Pulau Bangka.....	66
Tabel 1.3 pengelolaan Timah di Pulau Bangka.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Alur Berpikir	17
Gambar 2.2 Bagan Struktur Kekuasaan Menteri Rangga	63
Gambar 2.3 Skema Bentuk konsep Politik Melayu di Bangka	80
Gambar 2.4 Skema Transformasi Konsep Politik	91

DAFTAR LAMPIRAN

- lampiran 1. Pedoman Observasi
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Pedoman Informasi Informan
- Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi Informan